PROSEDUR PEMBONGKARAN DAN PENANGANAN HASIL TANGKAPAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TUGAS AKHIR

OLEH

RIFALDI
1322020335

JURUSAN PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2018

HALAMAN PENGESAHAN

PROSEDUR PEMBONGKARAN DAN PENANGANAN HASIL TANGKAPAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TUGAS AKHIR

Oleh:

RIFALDI
1322020335

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Penangkapan Ikan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
St. Muslimah Bachrum, S.Pi., M.Si	**Lendri, S.St.Pi., M.Si**
NIP. 19710605 199703 2 001	NIP. 19810511 200604 1 002

Mengetahui

Direktur	Ketua Jurusan
Dr. Ir. Darmawan, M.P	**Sahriani, S.Pi., M.Si**
NIP. 196702021998031002	NIP. 196812311995121001

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERETUJUAN PENGUJI

Judul	:	Prosedur pembongkaran dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan samudera (PPS) kendari provinsi sulawesi tenggara
Nama	:	RIFALDI
Nim	:	1322020335
Program Studi	:	Prodi Penangkapan Ikan
Jurusan	:	Penangkapan Ikan

Menyetujui,
Tim Penguji :

1. St. Muslimah Bachrum, S.Pi., M.Si (.....)
2. Lendri, S.St.Pi., M.Si (.....)
3. Dra. Asti Sugiarti, M.Si (.....)
4. Irawan Alham, ST., M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi :

Salman, S.Pi, M.Si
NIP. 196812311995121001

RINGKASAN

RIFALDI, 1322020335, Prosedur Pembongkaran dan Penanganan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dibawah bimbingan ST. MUSLIMAH BACHRUM dan LENDRI).

PPS Kendari adalah suatu pelabuhan perikanan Tipe A di Indonesia yang memiliki peranan dalam melayani para nelayan dan stakeholder dalam melakukan produksi dan pasca panen hasil perikanan dan memiliki beberapa fasilitas untuk mempermudah dan meningkatkan kelancaran operasional pelabuhan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan prosedur pembongkaran dan penanganan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikaan Samudera Kendari berdasarkan jenis alat tangkap yang beropersi pada saat pengambilan data yaitu alat tangkap *purse seine*.

Pengambilan data dilakukan selama tiga bulan, dengan metode

a. *Interview* atau wawancara langsung dengan pembimbing lapangan atau pegawai pelabuhan (PPS) Kendari
b. Observasi atau pengamatan langsung dengan cara berperan aktif selama kegiatan berlangsung.
c. Dokumentasi berupa foto-foto

Prosedur pembongkaran hasil tangkapan untuk kapal *Purse Seine* yaitu setelah kapal/perahu tiba di dermaga timur atau barat PPS Kendari, pengurus yang bersangkutan wajib melapor kepada Syahbandar untuk memperoleh surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK), kemudian melapor ke Kantor Kesehatan, Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, dan Kantor Perum Pelabuhan untuk memperoleh surat permohonan fasilitas tambat untuk membongkar muatannya.

Kata Kunci : *PPS Kendari,* Prosedur Pembongkaran dan Penanganan Hasil Tangkapan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT**, Sang Maha Agung yang telah memberikan setitik ilmuNya serta nikmat yang tak terhingga sehingga penulis diberikan ruang dan waktu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ditahun akademik 2017 – 2018 ini dapat terwujud. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi **Muhammad SAW** yang telah mengantar kita kepada zaman modernisasi ini dalam menggapai tujuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat dan moralitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari , khususnya dalam mengarungi dunia pendidikan.

Ucapan terimah kasih yang tak terhingga Penulis haturkan kepada :

1. Rampasa dan Halwan selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik hingga penulis menempuh jenjang pendidikan D3 Penangkapan Ikan.
2. Bapak Dr. Ir. Darmawan., M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Bapak Salman,S.Pi.,M,Si selaku Ketua Jurusan Penangkapan Ikan.
4. Ibu St. Muslimah Bachrum S.Pi.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Lendri S.St.Pi.,M.Si Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Ir. Frits Penehas Lesnussa, M.Si selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.
6. Bapak Recky Pangemanan, S.St.Pi selaku Kepala Seksi Operasional Pelabuhan

7. Kepada Bapak Idam, S.St.Pi serta seluruh staff Pelabuhan Perikanan Kendari yang telah membantu terkhusus pada sub bagian Tata Operasional.
8. Seluruh rekan teman-teman mahasiswa program studi Penangkapan Ikan angkatan XXVI dan Adik-adik Ankatan XXVII.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah di berikan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesmpurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya khususnya dalam bidang perikanan dan semoga bermanfaat dan bernilai ibadah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu Wattala. Amin

Pangkep, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 2

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Pelabuhan Perikanan 3

2.2. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Pelabuahan Perikanan 4

2.3. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 4

2.4. Fasilitas Pelabuhan Perikanan 5

2.5. Tata Cara Pelayanan Keluar Masuk Kapal 7

2.6. Pelayanan Dermaga Pembongkaran Ikan 10

2.7. Penanganan lkan Saat Pembongkaran 11

III METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat 13

3.2. Metode Pengumpulan Data 13

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum PPS Kendari 14

4.2. Sarana dan Prasarana 14

4.2.1 Fasilitas Pokok 15

4.2.2 Fasilitas Fungsional 16

4.2.3 Fasilitas Penunjang 17

4.3. Prosedur Pembongkaran Ikan dilaksanakan Berdasarkan Jenis Kapal dan Alat Tangkap yang Digunakan 18

4.4. Penanganan Ikan Di Darat 26

V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 31

5.2. Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN 35

RIWAYAT HIDUP 36

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Fasilitas Pokok PPS Kendari..... 15

Tabel 2. Fasilitas Fungsional..... 16

Tabel 3. Fasilitas Penunjang..... 18

Tabel 4. Kapal Bongkar Berdasarkan Jenis Alat Tangkap Di PPS Kendari..... 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Alur Proses Kedatangan Kapal 20

Gambar 2. Proses Pembongkaran Ikan Tuna Di Kapal Purse Seine..... 24

Gambar 3. Penyortiran Ikan Ke Dalam Karung..... 24

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. *Lay Out* PPS Kendari..... 38

Lampiran 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 39

Lampiran 3. Surat Tanda Bukti Lapor Kapal..... 40

Lampiran 4. Dokumentasi Persyartan Administrasi Kapal Masuk..... 41

Lampiran 5. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari (PPSK) 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Peraturan Menteri No.08/MEN/2012).

Untuk Mendukung kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati tersebut maka perlu didirikan fasilitas pendaratan dan juga pengolahan baik berupa kegiatan administrasi ataupun pengawasan kegiatan operasional bidang perikanan di pelabuhan perikanan.

PPS Kendari, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Kendari mulai dibangun pada tahun 1984 dan diresmikan pertama kali tanggal 10 September 1990 dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen No.08/MEN/2012 tentang perubahan nama, maka nama *Project Manajemen Unit* (PMU) berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari.

Setiap kapal tangkap diwajibkan melakukan aktivitas bongkar muatan di dermaga Pelabuhan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Aturan tersebut juga telah dicantumkam dalam *company profile* tiap perusahaan. Sehingga dirasa perlu informasi tentang Prosedur Pembongkaran dan Penanganan Hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan hal ini, penulis mengangkat tulisan Tugas Akhir Berjudul Prosedur Pembongkaran dan Penanganan Hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Provinsi Sulawesi Selatan

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan prosedur pembongkaran dan penanganan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikaan Samudera Kendari berdasarkan jenis alat tangkap yang beroperasi pada saat pengambilan data yaitu alat tangkap *purse seine*.

Kegunaan dari Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis serta mahasiswa pada umumnya tentang prosedur pembongkaran dan penanganan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan Perikanan (Firman, 2009).

2.2 Fungsi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

2.2.1 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No. 31 tahun 2004, yaitu:

1. Tempat tambat labuh kapal perikanan
2. Tempat pendaratan ikan
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan
4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan
5. Tempat mengumpulkan data tangkapan
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat perikanan
7. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal.

2.2.2 Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tujuan atau makna yang melekat pada istilah pembangunan, semuanya akan selalu menunjuk kepada sesuatu yang positif, artinya setiap pembangunan selalu diharapkan bermanfaat. Namun demikian, pada dasarnya kegiatan pembangunan pelabuhan termasuk pelabuhan perikanan yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak secara fisik yang berupa ancaman terhadap kerusakan ekologi baik berupa kerusakan lahan, biologi, maupun pencemaran. Pada umumnya setiap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan terdapat pula dampak sosial maupun ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994)

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan pasal 5, bahwa pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

1. **Pelabuhan Perikanan Samudera**

   Pelabuhan Perikanan Samudera juga dengan singkatan PPS, adalah pelabuhan perikanan kelas A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eklusif dan perairan internasional.

2. **Pelabuhan Perikanan Nusantara**

   Pelabuhan Perikanan Nusantara juga dapat disingkat PPN, adalah pelabuhan perikanan kelas B, yang skala layanannya sekurang-kurangnya

mencakup kegiatan usaha perikanan diwilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai

Pelabuhan Perikanan Pantai juga dapat disingkat PPP, adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan diwilayah perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial, Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan

Juga dapat disingkat PPI, adalah pelabuhan perikanan kelas D, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan diwilayah perairan pedalaman, kepulauan.

2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Di dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitas-fasilitas atau sarana yang ada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan sekala usaha perikanannya (Lubis, 2006).

Adapun fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan pasal 4 antara lain :

2.4.1 Fasilitas pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar utama yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas pokok tersebut antara lain :

a. Dermaga
b. Kolam pelabuhan
c. Alat navigasi
d. Pemecah gelombang

2.4.2 Fasilitas fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dan fasilitas pokok yang menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas fungsional ini dikelompokan menjadi dua antara lain :

a. Penanganan hasil tangkap dan pemasaranya, yaitu tempat pelelangan ikan, pabrik es, gudang es refrigrasi, dan gedung pemasaran
b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat penangkapan ikan, yaitu tempat perbaikan alat penangkapan ikan, ruang mesin, tempat perbaikan alat penangkapan ikan, ruangan mesin, tempat penjemuran alat penangkapan ikan, bengkel, *slipway*, gudang

jaring, fasilitas perbekalan (tangki instalasi air minum dan tangki bahan bakar) dan fasilitas komunikasi (stasiun jaringan telepon dan radio SSB).

2.4.3 Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas pelabuhan. Fasilitas penunjang yaitu:

a. Fasilitas kesejahteraan : MCK, poliklinik, mess, kantin dan musholah.
b. Fasilitas administrasi : Kantor Pengelola Pelabuhan, Ruang Operator, Kantor Syabandar dan Kantor Beacukai.

2.5 Tata Cara Pelayanan Keluar Masuk Kapal

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan diuraikan sebagai berikut :

a. Tata cara pelayanan kapal masuk
   1. Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
   2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan.

3. Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi.
4. Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menyiapkan tempat tambat labuh.
5. Nakhoda kapal perikanan setelah bersandar/tiba di pelabuhan perikanan, menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan, yang meliputi:
    a. SIPI atau SIKPI;
    b. Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
    c. *Log Book* penangkapan ikan bagi yang akan melakukan bongkar;
    d. Surat Laik Operasi dari pelabuhan asal;
    e. Surat ukur dan/atau surat tanda kebangsaan kapal;
    f. Sertifikat kelaikan pengawakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK);
    g. Sertifikat Kesempurnaan (*Sea Worthiness*) bagi kapal pengangkut ikan;
    h. Buku kesehatan;
    i. SPB dari pelabuhan asal;
    j. Buku pelaut (*seamen book*) atau paspor untuk nakhoda dan ABK berkewarganegaraan asing;

k. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;

l. Perjanjian kerja laut atau daftar nakhoda dan ABK;

m. Kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing; dan

n. Sertifikat radio kapal.

b. Tata cara pelayanan kapal keluar

1. Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
2. Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.
4. Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan, yang meliputi:

   a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;

   b. Bukti pembayaran retribusi lelang ikan;

c. Bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;

d. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; dan

e. Lembar awal-Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bagi kapal perikanan berukuran diatas 20 GT.

5. Bentuk dan format surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2013)

2.6 . Pelayanan Dermaga Pembongkaran lkan

Pelayanan dermaga bongkar disarankan agar areal lahan di sekitar lokasi tambat labuh disediakan tempat untuk penjemuran jaring, pengukuran tali dan sebagainya. Beberapa gedung disediakan untuk menjurai jaring, perbaikan kecil dan tempat penyimpanan alat tangkap dan suku cadang. Pelayanan terhadap kebutuhan perbekalan berupa bahan pokok yang disuplay untuk kapal adalah bahan makanan, air tawar dapat disuplai di dermaga bongkar maka pelayanan suplai BBM dan es mungkin memerlukan dermaga terpisah unutk mencegah pencemaran akibat tumpahan minyak, mencegah kontaminasi es waktu pengangkutan atau menghindari lalu lintas truk dan kapal bargas berlebihan melalui pelabuhan. bahan-bahan air dapat disalurkan melalui pipa dan tangki penyimpanan, sedangkan untuk es perlu disediakan mesin penghancur es (*mobile crusher*) (Murdianto, 2003)

Selanjutnya Murdianto (2003) menyatakan pula bahwa kapal yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan perikanan mendapatkan pelayanan sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga dan sarana bongkar muat oleh Perum:
2. Pengawasan barang-barang pabean oleh kantor beacukai
3. Pembinaan mutu hasil perikanan oleh dinas perikanan, dan
4. Pengecekan penggunaan alat tangkap ikan dan hasil tangkapannya oleh UPT pelabuhan perikanan

2.7 Penanganan lkan Pada Saat Pembongkaran

Salah satu kegiatan dalam pendaratan hasil tangkapan adalah pembongkaran ikan dari palka ke dek kapal. Kegiatan pembongkaran ini harus segera dilakukan tanpa penundaan waktu. Muatan hasil tangkapan harus segera dibongkar dengan cara hati-hati, cermat, beraturan, higienis dan tetap memperhatikan suhu ikan serendah mungkin (Ilyas, 1983). Dalam pembongkaran ikan digunakan wadah hasil tangkapan untuk menampung ikan. Setelah ikan dibongkar dari palka ke dek kapal, kemudian ikan diturunkan ke dermaga pendaratan dan selanjutnya diangkut ke ruang pelelangan (TPI) untuk mengikuti proses pelelangan.

Hanafiah dan Saefuddin (1983) menyatakan bahwa kegiatan penanganan hasil tangkapan dilaklukan sebelum proses transportasi (pengangkutan). Proses transfortasi adalah bergeraknya atau pemindahan produk dari tempat produksi dan atau tempat penjualan ke tempat dimana produk tersebut akan dipakai. Penentuan luas sempitnya daerah pasar dari hasil tangkapan yang akan dipasarkan tergantung pada biaya transportasi akan berfluktuasi seiring dengan angkutan yang digunakan serta harga BBM di pasaran yang menentukan tarif angkutan tersebut.

Pendistribusian ikan melelui darat biasanya dilakukan dengan alat transportasi seperti mobil atau kendaraan lain yang tertutup. Selama trasportasi suhu ikan diusahakan tetap dingin dengan cara menambahkan es selama perjalanan dan dimasukkan ke dalam kotak. Untuk mempertahankan suhu dingin secara efisien dan efektif, ikan dalam kotak ditutup terpal atau bahan lainnya. Apabila transportasi dilakukan melalui laut, ikan perlu dibekukan atau bahkan diberi es (Rahayu, 2000). dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dapat menutupi seluruh tubuh ikan untuk mencegah kebusukan.

Pendistribusian ikan melalui darat di PPS Kendari saat ini menggunakan sarana angkutan ikan (*truk container*) atau kendaraan lain dengan kapasitas yang lebih rendah. Proses distribusi melalui laut menggunakan kapal-kapal cargo (*carrier*) *boat* dengan tonase kurang dari 100 GT untuk ikan segar, ikan beku diangkut menggunakan kapal cargo dengan tonase 200-500 GT (Ritrianti, 1997)

Penanganan di tempat pendaratan pengumpulan yaitu dengan pengesan, pendinginan dalam kamar pendingin. atau air yang didinginkan, ketentuan sanitasi dan hygienis, dan memperhatikan faktor waktu (Ilyas, 1983).

Hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan ikan di tempat pendaratan atau pengumpulan: membongkar ikan dengan hati-hati, pisahkan es dari ikan sehingga memudahkan penimbangan, setelah ditimbang ikan diberi es lagi, menggunakan wadah yang mudah dibersihkan, jangan dibiarkan ikan kena sinar matahari langsung dan perlu penambahan es saat pelelangan, pengangkutan dan pengolahan, dan menggunakan sistem rantai dingin (Moeljanto, 1982).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Pengumpulan data lapangan dilakukan selama mengikuti kegiatan selama tiga bulan dari tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama kegiatan, antara lain :

3.2.1 Data Primer

d. *Interview* atau wawancara langsung dengan pembimbing lapangan atau pegawai pelabuhan (PPS) Kendari
e. Observasi atau pengamatan langsung dengan cara berperan aktif selama kegiatan berlangsung.
f. Dokumentasi berupa foto-foto

3.2.2 Data Sekunder

Data skunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu :

a. Data yang telah ada di perusahaan
b. Data yang di kumpulkan dari laporan tugas akhir terdahulu
c. Data yang di dapat melaui konsiltasi ke pembimbing dan literatur yang menunjang hal-hal yang terkait dengan dengan tugas akhir